

SUMBER DAYA AIR

2025

PERGUB JATENG NO. 35, BD 2025/ NO. 35, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH SUMBER DAYA AIR TINGKAT DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung peran Sumber Daya Air sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah yang berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan Air di Daerah. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Daerah Sumber Daya Air Tingkat Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2024; PERPRES No. 53 Tahun 2022; PEPRES No. 37 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai arahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi acuan bagi Gubernur dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya; Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan Program dan kegiatan yang terkait bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Sumber Daya Air melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
 - Lampiran 19 hlm.